



**DIRGAHAYU**

**REPUBLIK INDONESIA  
ke-75  
17 Agustus 2020**

**"INDONESIA MAJU"**

## **HOT TOPIC**

**Kunjungan DPD RI**

**Perayaan HUT ke-75 RI**

**Penandatanganan Nota  
Kesepahan BPK RI,  
Kejaksaan RI, dan POLRI**

**Entry Meeting Pemeriksaan  
Penanganan Pandemi  
COVID-19 se-Sulbar**



## **"Komite IV DPD RI Apresiasi Kinerja BPK Sulbar"**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 20 ayat (6) disebutkan bahwa "BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester," sementara pada Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa "Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai kewenangannya". Hasil penelaahan dan pembahasan yang dilakukan oleh DPD RI akan menjadi bahan untuk membuat pertimbangan dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara ...(Lanjut ke halaman 3).



# NUANSA BARU PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN KE-75 RI INDONESIA MAJU



Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia pada tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Sejak penetapan status siaga darurat dan tanggap darurat atas Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 31 Maret 2020, pelaksanaan peringatan HUT Kemerdekaan diputuskan agar dilakukan secara sederhana guna menghindari dan meminimalisir pergerakan orang dalam satu kerumunan.

Sebagai gantinya Pimpinan kantor perwakilan BPK RI di daerah harus mengikuti Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Merah Putih sebagai bagian dalam rangkaian acara pelaksanaan peringatan HUT Kemerdekaan ke-75 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di halaman kompleks perkantoran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Selaku Pimpinan Kantor Perwakilan BPK RI di daerah, Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat **Muhamad Toha Arafat**, hadir secara langsung dalam Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih yang dipimpin oleh Gubernur Sulawesi Barat **Ali Ba'al Masdar** yang bertindak selaku Inspektur Upacara maupun dalam Upacara Penurunan Bendera Merah Putih yang dipimpin oleh Wakil Gubernur **Enny Anggraeny Anwar** yang bertindak selaku Inspektur Upacara.

# KUNJUNGAN KERJA, KOMITE IV DPD RI APRESIASI KINERJA BPK SULBAR

... Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK RI, **Muhamad Toha Arafat** beserta jajaran menerima kunjungan kerja Komite IV Anggota DPD RI dari Dapil Sulawesi Barat. Kunjungan kerja Anggota Komite IV DPD RI yang diwakili oleh **Ajbar** untuk melakukan konsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terkait permasalahan-permasalahan pemeriksaan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2019 dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat seperti tindak lanjut pemerintah daerah atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, penyelesaian ganti kerugian daerah, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait dengan Dana Desa dan Dana Kelurahan dalam kaitan penyusunan Pertimbangan DPD RI dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam kesempatan tersebut, juga dibahas berbagai tema seperti cakupan pemeriksaan yang mencakup sejak tahap perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya, permasalahan terkait pengelolaan Dana BOS, dan permasalahan pengangkatan GTT dan PTT oleh kepala daerah. Selain itu, juga dilakukan penukaran Plakat dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi barat d.h.i Kepala Perwakilan kepada Anggota Komite IV DPD RI dan sebaliknya sebagai bentuk penghargaan atas kunjungan pertama Bapak Ajbar ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.



## TAHUKAH KAMU?



Komite IV DPD RI merupakan komite kerja yang membidangi APBD, Pajak dan Pungutan lain, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Lembaga Keuangan dan Perbankan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Statistik, Badan Usaha Milik Negara yang berkaitan dengan Keuangan, dan Investasi dan Penanaman Modal.



**"UNTUK MENJADI KUAT, KITA  
TIDAK BISA LAGI BERJALAN  
SENDIRI-SENDIRI. EGO SEKTORAL  
TIDAK RELEVAN LAGI.  
KOLABORASI DAN SINERGI ANTAR  
LEMBAGA HARUS DITINGKATKAN."  
- JOKO WIDODO**



## Penandatanganan Nota Kesepahaman BPK RI – Kejaksaan RI – Kepolisian RI, Menuju Sinergitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK RI **Muhamad Toha Arafat**, mengikuti acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Selasa, 11 Agustus 2020. Bertempat di Ruang Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua BPK RI **Agung Firman Sampurna**, dengan Jaksa Agung RI **ST Burhanuddin**, dan dengan Kapolri **Idham Azis**, memuat tentang sinergitas tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana dengan Kejaksaan dan Kepolisian.

Pada kesempatan yang sama, MT Arafat didampingi oleh Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Barat **Eko Budi Sampurno**, dan Wakil Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Barat **Agustin**, dengan khidmat mengikuti rangkaian acara penandatanganan Nota Kesepahaman yang dilakukan oleh Pimpinan dari Instansi masing-masing. Di akhir rangkaian acara, Provinsi Sulawesi Barat terpilih secara acak bersama dengan Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan dialog interaktif dengan Ketua BPK RI, Jaksa Agung RI, dan Kapolri. Dalam dialognya, Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK RI Muhamad Toha Arafat, menyampaikan bahwa seluruh Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Barat telah diserahkan tanpa ada keterlambatan dan memperoleh Opini 100% WTP.

### BERSATU LAWAN NARKOTIKA, UNTUK SULBAR MALAQBBI

Semangat pemberantasan narkoba terasa spesial di Provinsi Sulawesi Barat. Melalui momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Barat melakukan pengungkapan atas kasus peredaran narkoba di wilayah hukum pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat dan disaksikan oleh unsur Forkopimda seperti DPRD, Kejaksaan Tinggi, TNI AL, Binda, serta unsur Instansi Vertikal diantaranya BPN, BKKBN, DJPB, BPKP, dan tak terkecuali BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan **Muhamad Toha Arafat**.

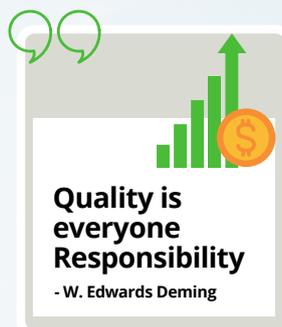


# ENTRY MEETING PEMERIKSAAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 SE-SULBAR



Kepala Perwakilan (Kalan) Provinsi Sulawesi Barat BPK RI **Muhamad Toha Arafat**, memimpin pelaksanaan Entry Meeting pelaksanaan Pendahuluan Pemeriksaan Kepatuhan dan Pemeriksaan Kinerja atas Penanganan Pandemi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Majene, Mamasa dan Kabupaten Pasangkayu. Mengawali sambutannya, M T Arafat, menyampaikan bahwa hal-hal yang melatar belakangi Pemeriksaan Penanganan Pandemi COVID-19 seperti 1) penetapan bencana COVID-19 oleh WHO sebagai Pandemi yang telah menyebar di 215 negara; 2) penetapan bencana COVID-19 oleh Pemerintah RI sebagai bencana nasional sesuai dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020; 3) bencana terjadi secara masif hampir diseluruh Wilayah Republik Indonesia dan telah menimbulkan korban jiwa, serta berdampak secara ekonomi dan sosial (pengangguran dan kemiskinan); dan 4) besarnya anggaran yang dialokasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta sumbangan pihak ketiga dalam rangka penanganan bencana COVID-19.

Selain itu, M T Arafat juga memaparkan mekanisme pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan akan disesuaikan dengan kondisi dan protokol kesehatan yang berlaku, dan jika memungkinkan pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (tempat kedudukan entitas) atau di kantor BPK Perwakilan atau dilakukan secara Work From Home (WFH). Lebih lanjut Kalan Provinsi Sulawesi Barat menjelaskan bahwa tujuan pemeriksaan atas penanganan Pandemi COVID-19 ini ialah efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah dalam darurat Pandemi COVID-19 serta berharap agar tidak terjadi pelanggaran kepatuhan atas peraturan perundang-undangan dan pelanggaran atas pengendalian internal dalam penggunaan keuangan negara/daerah untuk menangani COVID-19 sehingga BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tidak perlu melakukan pemeriksaan investigasi atas penanganan COVID-19.



# LAKUKAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT, BPK SULBAR BERHARAP PEMDA OPTIMALKAN PERAN TIM TLRHP



Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (pasal 20) dan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (pasal 8, ayat 5) yakni “pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima dan tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang cukup, kompeten dan relevan serta terverifikasi oleh aparat pengawas intern”. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dimaksud dapat dikenai sanksi administratif. Untuk itu, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan kegiatan pemantauan dan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk periode Semester I Tahun 2020. Bertempat di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Entry Meeting atas pelaksanaan pemantauan dan pembahasan TLRHP yang dilaksanakan secara daring tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK RI, Muhamad Toha Arafat dan diikuti secara virtual oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Enny Anggraeny Anwar, Wakil Bupati Majene, Lukman, Wakil Bupati Polewali Mandar, Muh. Natsir Rahmat, Wakil Bupati Mamasa, Martinus Tiranda, Wakil Bupati Pasangkayu, Muhammad Saal, Wakil Bupati Mamuju Tengah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Askary. Selain itu turut hadir para Inspektur Pemerintah se-Sulawesi Barat bersama Admin dan Inputter Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) pada masing-masing pemerintah se-Sulawesi Barat, serta Tim Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

## GOBAR PSM INSTANSI VERTIKAL SE-SULAWESI BARAT



Pelaksanaan Gobar PSM yang mengambil titik kumpul di wilayah Pasar Sentral (Pasar Baru) Kabupaten Mamuju diisi dengan kegiatan *Sharing Session* kepada masyarakat oleh para peserta Gobar dengan mengambil tema terkait jenis-jenis Narkotika oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat; jenis-jenis zat atau bahan berbahaya yang dapat terkandung dalam makanan oleh Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Sulawesi Barat; alternatif pembiayaan bagi UMKM/IKM oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat; informasi umum terkait Agraria oleh Kepala ATR/BPN Provinsi Sulawesi Barat; serta informasi terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK RI Muhamad Toha Arafat.

# JADI NARASUMBER, MT ARAFAT SAMPAIKAN PRINSIP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BPK



Kegiatan yang dilaksanakan di ruang meeting lantai II Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat ini menghadirkan Para Pengurus Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam pelaksanaannya, Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK RI **Muhamad Toha Arafat** menyampaikan alur Pertanggungjawaban atas Bantuan Keuangan Partai Politik sejak diterima hingga pemeriksaan oleh BPK dan mengingatkan bahwa pengelolaan Dana Bantuan Partai Politik tersebut diprioritaskan untuk tujuan Pendidikan politik seperti seminar dan workshop, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, maupun pertemuan lainnya sesuai tusi. Selain itu, MT Arafat juga menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan para Pengurus Partai Politik yang hadir dalam rangka pertanggungjawaban atas Dana Bantuan Partai Politik yang diterima diantaranya seperti, ketepatan rekening penerima bantuan keuangan partai politik, kesesuaian jumlah bantuan keuangan partai politik antara yang dilaporkan dalam LPJ dengan yang diterima, kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ, dan kepatuhan penggunaan bantuan partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## GALLERY



Kalan BPK Sulbar Saksikan Penyaluran Bantuan



Kado Spesial Untuk "Darmawati Aswar"



Kalan BPK Sulbar Hadiri Peresmian KAL Manakarra



Kemeriahan Malam Ramah Tamah HUT Sulbar ke-16



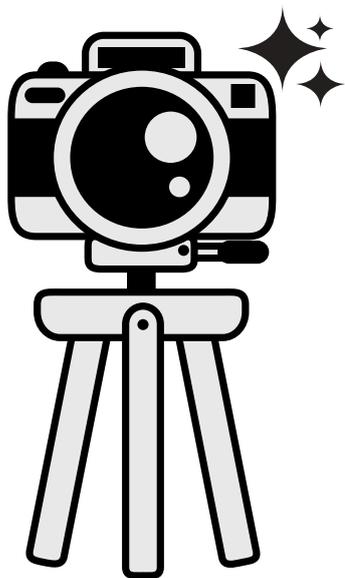
# Happy Weedding

**David and Queen**



**Ashari and Meidina**

## REDAKSI



Pengarah : Hery Ridwan

Penanggungjawab : Asih Waryanti

Ketua : I Made Anom Jumitra

Sekretaris : Dedi Setyawan

Tim Redaksi : Ardiansyah, Suci Nurlaeli, Dicky Febriano, Husen Wahyu

Adi, Destri Yudarni, Hilman Saputera

Email : [humastu.sulbar@bpk.go.id](mailto:humastu.sulbar@bpk.go.id)

Redaksi menerima saran, kritik, maupun artikel yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan, kegiatan ke-BPK-an dan materi lainnya. Setiap kiriman artikel yang dimuat akan mendapatkan cinderamata menarik dari redaksi

SPIRIT AND EQUITY  
TRIWULAN III 2020



**Buletin Sandeq Tahun 2020**